



IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA DI KAMPUNG SUMBER REJEKI DISTRIK KURIK KABUPATEN MERAUKE

Eka Sugiarti Setianingrum¹, David Laiyan²

Syahrabudin Husein Enala³, Frederikus Antonius Mana⁴

¹Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Musamus, Indonesia

²³Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Musamus, Indonesia

Email: setianingrum2304@gmail¹, davidlaiyan@unmus.ac.id²,

syahrabudinhuseinenala@unmus.ac.id³, manafrederick@gmail.com⁴

Received: 07-02-2025

Accepted: 03-03-2025

Published: 15-03-2025

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Sumber Rejeki Village by assessing aspects such as policy objectives and targets, resources, organizational characteristics, implementer attitudes, inter-organizational communication, as well as the economic, social, and political environment. The research method used is a qualitative approach with in-depth interviews conducted with key informants, including policy implementers, PKH assistants, and beneficiaries. The findings indicate that the PKH policy's objectives are well understood by the target community, but there are challenges related to uneven aid distribution, leading to social injustice among more vulnerable groups. The available resources, while adequate, have not been optimally utilized to reach all impoverished communities, especially those in remote areas. The characteristics of the implementing organization show good coordination, but improvements are needed in transparency and communication with the public, particularly those not registered as beneficiaries. The professional and empathetic attitude of the implementers greatly supports the program's success, although there are shortcomings in communication and outreach to the general public. The economic, social, and political environment plays a significant role in the successful implementation of PKH, with challenges such as social jealousy and local political factors affecting aid distribution. Therefore, it is recommended to enhance transparency in the data collection and aid distribution processes, strengthen the capacity of social assistants, and expand outreach efforts to ensure that the PKH program is more equitable and effective in achieving its goals.

Keywords: Family Hope Program, policy implementation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Sumber Rejeki dengan menilai aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada informan kunci, seperti pelaksana kebijakan, pendamping PKH, dan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan kebijakan PKH sudah dipahami dengan baik oleh masyarakat sasaran, namun terdapat kendala dalam distribusi bantuan yang belum merata, yang menyebabkan ketidakadilan sosial di kalangan kelompok yang lebih rentan. Sumber daya yang tersedia, meskipun cukup, masih belum optimal dalam

menjangkau seluruh masyarakat miskin, terutama di daerah terpencil. Karakteristik organisasi pelaksana menunjukkan adanya koordinasi yang baik, namun masih diperlukan perbaikan dalam hal transparansi dan komunikasi dengan masyarakat, terutama yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat. Sikap pelaksana yang profesional dan empatik sangat mendukung keberhasilan program, meskipun ada kekurangan dalam hal komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat umum. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik berperan signifikan dalam keberhasilan implementasi PKH, dengan kendala kecemburuan sosial dan politik lokal yang memengaruhi distribusi bantuan. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan transparansi dalam proses pendataan dan distribusi bantuan, memperkuat kapasitas pendamping sosial, serta memperluas sosialisasi agar program PKH dapat lebih merata dan efektif dalam mencapai tujuannya.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, implementasi kebijakan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara besar yang sedang berkembang menghadapi berbagai masalah, salah satunya adalah kemiskinan. Ketimpangan distribusi pendapatan menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan. Suryawati (2005) menyatakan bahwa kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang kekurangan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan air minum yang berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak. Todaro dan Smith (2014) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah mendasar yang menjadi perhatian pemerintah di hampir semua negara berkembang, dengan standar hidup yang rendah, terutama di daerah-daerah miskin.

Menurut World Bank (2019), meskipun pemerintah Indonesia telah berhasil menekan angka kemiskinan, ketimpangan antar daerah tetap menjadi tantangan besar. Kemiskinan dinilai sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2020). BPS (2020) juga menyatakan bahwa kemiskinan dapat diukur dengan kalori yang dikonsumsi, yakni jika seseorang hanya mampu mengonsumsi kurang dari 2100 kalori per kapita per hari, maka dianggap miskin. Haughton dan Khandker (2012) menambahkan bahwa kemiskinan sering kali terkonsentrasi di pedesaan atau daerah yang kekurangan sumber daya. Jumlah penduduk miskin yang tinggi dapat menghambat pembangunan ekonomi karena akan membutuhkan biaya yang lebih besar untuk pembangunan.

Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah Indonesia melaksanakan berbagai program pembangunan. Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang dilaksanakan sejak tahun 2007 untuk mengurangi angka kemiskinan, terutama kemiskinan kronis. PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dengan tujuan untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi ibu hamil, balita, serta penyandang disabilitas dan lansia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai regulasi terkait, PKH diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan sosial keluarga miskin.

Di Kabupaten Merauke, Papua, Program Keluarga Harapan telah

diberlakukan sejak tahun 2016 dan diperluas ke distrik-distrik pada 2018, termasuk Distrik Kurik. Pada Distrik Kurik terdapat 13 kampung, salah satunya adalah Kampung Sumber Rejeki. Data penerima manfaat di Kampung Sumber Rejeki menunjukkan peningkatan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) setiap tahunnya, dengan 27 KPM pada tahun 2021, 33 KPM pada 2022, dan 35 KPM pada 2023. Program PKH di kampung ini telah memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama untuk mendukung anak sekolah, ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas.

Namun, pelaksanaan PKH di Kampung Sumber Rejeki tidak terlepas dari tantangan. Salah satu masalah utama adalah kevalidan data penerima bantuan. Beberapa peserta yang seharusnya menerima bantuan tidak terdata, sementara beberapa yang tidak memenuhi kriteria Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) malah tercatat sebagai penerima. Hal ini disebabkan oleh data awal yang diterima dari pusat (Kementerian Sosial) yang berdasarkan data statistik 10 tahun sebelumnya, yang tidak selalu mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Oleh karena itu, pendamping PKH harus melakukan pemutakhiran data untuk memastikan bahwa keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat terdaftar sebagai penerima.

Pendamping PKH juga melaksanakan pertemuan rutin setiap bulan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk membahas masalah yang ada dan mempererat hubungan antara KPM dan pendamping dalam jangka panjang. Pemutakhiran data dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah peserta atau pertemuan kelompok yang telah dibentuk sebelumnya.

Meski demikian, implementasi PKH di beberapa daerah masih menghadapi kendala. Kusman Yuhana dan Titin Kartini (2020) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa di Kelurahan Cigadung Kabupaten Subang, implementasi PKH belum optimal, dengan masalah pada prosedur dan mekanisme pelaksanaan. Hal serupa juga ditemukan di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, menurut Herlina dkk (2020), yang menyatakan bahwa sosialisasi dan pendataan masih belum maksimal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perbaikan dalam implementasi PKH agar program ini benar-benar dapat memberikan manfaat kepada keluarga miskin yang membutuhkan.

Dengan demikian, keberhasilan PKH dalam menanggulangi kemiskinan sangat bergantung pada keakuratan data dan pelaksanaan program yang profesional. Jika program ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan secara signifikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini perlu terus disempurnakan agar dapat memenuhi tujuannya secara optimal, sehingga keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat mendapatkannya tanpa terkendala masalah data atau prosedur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di Kampung Sumber Rejeki, Kabupaten Merauke. Menurut Narbuko dan Ahmadi (2015), penelitian deskriptif bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada berdasarkan data yang dikumpulkan, dengan proses analisis yang meliputi penyajian, analisis, dan interpretasi data. Penelitian ini akan dilakukan di Kampung Sumber Rejeki, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan pelaksanaan diperkirakan berlangsung dari bulan November hingga Desember 2024.

Subjek penelitian ini adalah informan yang terdiri dari 11 orang, dengan rincian 3 informan kunci, yaitu Kepala Dinas Sosial Merauke, Pendamping PKH, dan Kepala Kampung Sumber Rejeki. Sementara itu, 8 informan tambahan terdiri dari 5 penerima manfaat PKH dan 3 bukan penerima manfaat. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari informan kunci dan informan penunjang. Data yang diperoleh terbagi menjadi dua jenis, yakni data primer yang didapat langsung dari sumbernya dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen atau catatan yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung situasi sosial di lapangan, wawancara untuk menggali informasi lebih mendalam dari informan, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data berupa arsip, laporan, atau gambar yang relevan dengan topik penelitian. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif dengan teknik pengolahan yang bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif dan mudah dipahami. Proses analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data bertujuan untuk merangkum dan memfokuskan data yang relevan, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang objek penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan adalah temuan baru yang diperoleh melalui verifikasi dan analisis mendalam, sehingga memperjelas pemahaman mengenai implementasi PKH di Kampung Sumber Rejeki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat, serta memberikan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan kebijakan ini dipahami dengan jelas oleh berbagai informan, baik dari pelaksana (GEP, ESS, BI) maupun penerima manfaat. Namun, ada kendala dalam pemerataan distribusi bantuan, di mana masih terdapat beberapa individu yang

merasa tidak mendapatkan bantuan, meskipun program berjalan dengan baik di banyak aspek seperti pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan analisis indikator dan teori, Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan yang dirumuskan secara jelas dan dipahami oleh masyarakat sasaran. Tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat, serta memberikan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, sesuai dengan prinsip kebijakan publik yang menekankan pentingnya kejelasan dan keterukuran dalam tujuan sebagai landasan implementasi dan evaluasi (Dunn, 2003).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa baik pelaksana maupun penerima manfaat memahami esensi dan arah kebijakan ini. Pelaksana kebijakan menggarisbawahi peran PKH dalam membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Hal ini didukung oleh kesaksian penerima manfaat yang merasakan dampak langsung dari program tersebut, seperti kemudahan mengakses layanan kesehatan tanpa biaya dan dukungan untuk keberlanjutan pendidikan anak. Namun, meskipun pemahaman terhadap tujuan kebijakan sudah baik, masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, khususnya terkait distribusi bantuan yang belum merata.

Menurut teori implementasi kebijakan dari Edwards III (1980), keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks PKH, komunikasi terkait tujuan kebijakan telah berjalan dengan baik, terlihat dari pemahaman yang konsisten di kalangan pelaksana dan masyarakat. Namun, masalah muncul pada aspek sumber daya dan struktur birokrasi, terutama dalam hal validasi data penerima manfaat dan kemampuan pelaksana menjangkau seluruh kelompok yang memenuhi kriteria. Informan mencatat bahwa masih terdapat keluarga miskin, lansia, dan kelompok rentan lainnya yang belum menerima bantuan, meskipun mereka memenuhi syarat. Ketidakmerataan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam proses pendataan dan distribusi, yang menciptakan potensi kecemburuan sosial di masyarakat.

Dari perspektif keadilan sosial, teori Rawls (1971) menekankan bahwa kebijakan publik harus memberikan manfaat yang maksimal bagi kelompok yang paling rentan. Dalam implementasi PKH, prinsip ini belum sepenuhnya tercapai karena adanya kesenjangan dalam distribusi bantuan. Beberapa informan menyoroti bahwa bantuan PKH cenderung lebih mudah diakses oleh keluarga dengan anak sekolah, sementara kelompok seperti lansia dan rumah tangga tanpa anak sering kali terabaikan. Hal ini menimbulkan persepsi ketidakadilan yang dapat menghambat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup validasi ulang data penerima manfaat secara berkala, pelibatan masyarakat dalam proses pendataan, dan penguatan peran

pendamping sosial untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Selain itu, mekanisme pengaduan yang lebih inklusif dan responsif perlu diterapkan untuk menampung keluhan dan masukan dari masyarakat, sehingga kebijakan dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pendataan serta distribusi bantuan.

Dengan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, Program Keluarga Harapan memiliki potensi untuk lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Tidak hanya mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga menciptakan dampak yang lebih luas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Implementasi yang lebih merata dan adil akan memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi seluruh kelompok yang membutuhkan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan program PKH termasuk tenaga kerja (pendamping), anggaran, fasilitas, serta infrastruktur lainnya. Mayoritas informan mengungkapkan bahwa tenaga kerja (pendamping) cukup memadai, meskipun ada kekurangan dalam jumlah pendamping untuk menjangkau seluruh keluarga, terutama di daerah terpencil. Fasilitas seperti tempat untuk pertemuan dan penyaluran bantuan sudah ada, namun ada kekurangan dalam hal sarana komunikasi dan informasi. Dana yang tersedia sudah cukup untuk keluarga penerima manfaat yang terdaftar, namun ada kekurangan fasilitas dan dukungan bagi masyarakat yang belum terdaftar atau yang tidak mendapatkan bantuan. Beberapa masyarakat yang tidak menerima bantuan merasa ada kesenjangan dalam distribusi informasi terkait program.

Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat dipengaruhi oleh organisasi pelaksana, seperti Dinas Sosial dan pendamping PKH. Struktur yang jelas, koordinasi yang baik antara Dinas Sosial, pendamping, dan masyarakat, serta kesiapan dalam memberikan pendampingan yang efektif menjadi faktor kunci. Beberapa informan mengungkapkan pentingnya koordinasi yang baik, meskipun beberapa juga mencatat kekurangan dalam sosialisasi dan pembimbingan bagi pendamping.

Sikap positif, profesional, dan empatik dari pelaksana seperti pendamping PKH dan petugas lainnya sangat mempengaruhi keberhasilan program. Sebagian besar penerima manfaat merasa puas dengan sikap pendamping yang ramah dan responsif. Namun, beberapa masyarakat yang tidak terdaftar merasa kurang diperhatikan karena fokus lebih pada yang terdaftar.

Komunikasi antar organisasi pelaksana sangat penting dalam memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar. Sebagian besar penerima manfaat merasa terbantu dengan komunikasi yang baik antara

Dinas Sosial, pendamping PKH, dan petugas lainnya. Meskipun demikian, ada keluhan terkait informasi yang terlambat sampai ke masyarakat dan kurangnya sosialisasi bagi yang tidak terdaftar.

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik berpengaruh pada pelaksanaan PKH. Di daerah dengan banyak petani yang hidup pas-pasan, adanya kecemburuan sosial muncul karena tidak semua orang mendapatkan bantuan. Beberapa masyarakat yang tidak terdaftar merasa ada ketidakjelasan dalam proses seleksi penerima bantuan, dengan beberapa berpendapat faktor hubungan sosial dan politik memengaruhi distribusi bantuan. Pendamping PKH perlu lebih inklusif dalam sosialisasi dan memastikan transparansi dalam penyaluran bantuan.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Program Keluarga Harapan (PKH) sangat berperan dalam keberhasilan program ini. Dinas Sosial dan pendamping PKH perlu memiliki struktur organisasi yang jelas agar tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan efisien. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak sangat penting untuk menghindari kesalahan pendataan, kesalahan penyaluran bantuan, dan kesenjangan implementasi. Pendamping PKH juga perlu memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan yang efektif kepada keluarga penerima manfaat. Berdasarkan wawancara dengan para informan kunci, mereka menyatakan bahwa koordinasi antara Dinas Sosial, pendamping, dan pihak terkait lainnya sudah berjalan baik. Namun, pendamping masih membutuhkan pembimbingan lebih lanjut agar dapat melakukan pelatihan dan sosialisasi dengan lebih maksimal. Pendamping PKH yang siap memberikan bantuan dan solusi ketika terjadi masalah juga menjadi indikator kesiapan organisasi pelaksana. Pendamping PKH diharapkan tidak hanya mendistribusikan bantuan, tetapi juga memberikan arahan terkait penggunaan bantuan dan memfasilitasi akses pendidikan serta kesehatan. Keberhasilan program PKH sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi pelaksana, koordinasi yang baik, serta keterampilan pendamping dalam menjalankan tugasnya. Penerima manfaat, menyatakan bahwa mereka merasa puas dengan program ini karena pendamping responsif terhadap keluhan dan memberikan pelatihan kelompok. Masyarakat yang tidak mendapatkan program PKH, merasa kurang mendapat informasi yang jelas mengenai kriteria penerima bantuan dan proses seleksi, sehingga sosialisasi perlu diperbaiki agar program ini lebih merata.

Karakteristik organisasi pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) memegang peranan kunci dalam mencapai tujuan program. Beberapa elemen penting, seperti struktur organisasi yang jelas, koordinasi yang efektif, dan kapasitas pendamping yang memadai, sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Struktur organisasi yang jelas membantu setiap pihak memahami tugas dan tanggung jawabnya, mengurangi risiko duplikasi atau kekacauan dalam pelaksanaan. Koordinasi yang baik antara Dinas Sosial, pendamping

PKH, aparat kampung, dan lembaga terkait, seperti lembaga bayar, dianggap sebagai faktor utama dalam kelancaran program. Informan menyatakan bahwa koordinasi adalah kunci utama keberhasilan pelaksanaan program. Namun, ada pula yang menyoroti pentingnya pembimbingan lebih lanjut bagi pendamping agar mereka dapat memberikan pelatihan dan sosialisasi yang lebih efektif. Pendamping PKH memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan keluarga penerima manfaat. Sebagian besar informan dan penerima manfaat menyatakan bahwa pendamping telah cukup siap dalam menjalankan tugasnya, dengan responsif terhadap keluhan dan proaktif dalam mendampingi penerima manfaat selama proses pengambilan bantuan serta kegiatan kelompok belajar. Namun, ada kekhawatiran dari masyarakat yang belum terdaftar, yang merasa bahwa pendamping lebih fokus pada mereka yang sudah terdaftar, sehingga mereka merasa kurang dilibatkan dalam program. Meskipun koordinasi dan kesiapan pendamping sudah cukup baik, masyarakat yang tidak terdaftar merasa kurang mendapatkan perhatian, terutama dalam hal sosialisasi dan verifikasi. Kurangnya transparansi mengenai kriteria penerima manfaat dan mekanisme seleksi menciptakan ketidakjelasan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang membutuhkan namun tidak terdaftar. Selain itu, pendamping menghadapi tantangan dalam hal jumlah personel yang terbatas, yang menyulitkan mereka untuk menjangkau seluruh wilayah desa. Berdasarkan teori implementasi kebijakan dari Edwards III (1980), yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu program dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, meskipun struktur organisasi dan koordinasi menunjukkan kesiapan yang cukup baik, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal komunikasi yang lebih inklusif dan transparan, serta pemenuhan kapasitas pendamping yang lebih optimal. Perbaikan ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas program secara keseluruhan.

4. Sikap dan kecenderungan para pelaksana

Program Keluarga Harapan (PKH) sangat mempengaruhi keberhasilan program. Para pelaksana, termasuk pendamping dan petugas pembayaran, menunjukkan sikap profesional, ramah, dan empatik, yang memudahkan penyaluran bantuan dan menciptakan hubungan baik dengan penerima manfaat. Sebagian besar penerima manfaat merasa puas dengan sikap positif pendamping dan petugas, yang sigap merespon keluhan dan selalu berkomunikasi dengan baik. Namun, masyarakat yang tidak terdaftar merasa kurang mendapat perhatian dan informasi mengenai pendaftaran, dan berharap adanya sosialisasi yang lebih inklusif agar program dapat merata.

Sikap dan kecenderungan para pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan masyarakat terhadap program ini, efektivitas implementasi di lapangan, serta keberlanjutan program. Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan, sikap positif, empatik, dan profesional yang ditunjukkan oleh

pelaksana program, seperti pendamping PKH, petugas Dinas Sosial, dan petugas bayar (kantor POS dan Bank BRI), menjadi kunci utama keberhasilan program di berbagai lokasi. Para informan kunci menegaskan bahwa para pelaksana program menunjukkan tanggung jawab dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas mereka. Informan Kunci menyatakan bahwa kerja sama antara pendamping, petugas bayar, dan pihak terkait telah memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan minim hambatan. Kerja sama yang solid ini sangat mendukung pelaksanaan program, terutama dalam proses penyaluran bantuan. Salah seorang informan kunci juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara pelaksana dan masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan program di kampungnya.

Dari sudut pandang penerima manfaat, sikap empatik dan ramah dari pendamping PKH sangat diapresiasi. Beberapa informan menggambarkan pendamping dan petugas bayar sebagai individu yang sabar, ramah, dan sigap dalam menangani keluhan. Salah seorang informan bahkan menyebutkan bahwa ketika terjadi masalah, seperti bantuan yang tidak masuk, pendamping dengan cepat merespons dan mencari solusi. Sikap ini menciptakan hubungan yang baik antara penerima manfaat dan pelaksana program, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PKH.

Namun, masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat mengungkapkan perasaan kurang diperhatikan dalam komunikasi dan sosialisasi program. Mereka menyebutkan bahwa meskipun sikap pendamping secara umum baik, komunikasi mereka lebih terfokus pada masyarakat yang sudah terdaftar. Informasi mengenai prosedur pendaftaran dan kriteria penerima manfaat dinilai kurang inklusif, sehingga menciptakan kesenjangan informasi. Salah seorang informan menyoroti pentingnya peningkatan keterlibatan masyarakat yang belum terdaftar untuk menjadikan program lebih merata. Informan lainnya menambahkan bahwa sosialisasi yang lebih mendalam dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program PKH.

Sikap positif dan profesionalisme pelaksana tidak hanya memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap program, tetapi juga berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendampingan. Salah seorang informan menyatakan bahwa dirinya tetap hadir dalam pertemuan atau kegiatan yang diadakan oleh pendamping karena merasa dihargai dan didengar. Sebaliknya, jika sikap pelaksana kurang baik, partisipasi masyarakat cenderung menurun.

5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi yang efektif antara organisasi pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH), seperti Dinas Sosial, pendamping PKH, dan pihak terkait lainnya, sangat penting untuk kelancaran program. Koordinasi yang baik memastikan penyaluran bantuan tidak terganggu, menghindari hambatan yang bisa merugikan masyarakat. Sebagian besar penerima manfaat mengakui adanya komunikasi yang baik antara pendamping dan petugas, yang memastikan bantuan diterima tepat

waktu dan dengan prosedur yang jelas. Namun, masyarakat yang tidak terdaftar merasa kurang diperhatikan, dengan informasi sering terlambat atau tidak lengkap, yang mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap program.

Komunikasi antar organisasi memegang peranan penting dalam memastikan keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Robbins dan Judge (2017), komunikasi yang efektif mencakup penyampaian informasi yang jelas, koordinasi yang terstruktur, dan pengelolaan konflik yang baik. Mintzberg (1993) juga menekankan bahwa aliran informasi yang lancar, kesepahaman antar pihak, dan kerja sama yang baik menjadi dasar keberhasilan koordinasi dalam organisasi. Dalam konteks PKH, indikator keberhasilan komunikasi mencakup kejelasan informasi, koordinasi yang baik, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, inklusivitas dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan ketepatan waktu dalam penyampaian informasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kejelasan informasi menjadi salah satu kekuatan utama program ini. Beberapa informan kunci menyebutkan bahwa pendamping PKH selalu berkomunikasi dengan petugas bayar dan aparat kampung sebelum penyaluran bantuan dilakukan, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan terorganisir. Selain itu, koordinasi yang baik antara pendamping, petugas bayar, dan aparat kampung memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. Responsivitas juga menjadi poin penting, di mana beberapa informan mengapresiasi kesigapan pendamping dalam menangani keluhan masyarakat terkait bantuan yang diterima.

Namun, terdapat kelemahan dalam aspek inklusivitas dan ketepatan waktu. Beberapa informan mengungkapkan bahwa informasi mengenai pendaftaran PKH dan kebijakan baru seringkali tidak menjangkau masyarakat yang belum terdaftar, sehingga mereka merasa kurang dilibatkan. Salah seorang informan menyoroti bahwa keterlambatan dalam penyampaian informasi kebijakan baru sering kali membingungkan masyarakat. Kekurangan ini dapat diatasi dengan meningkatkan sosialisasi yang lebih luas dan menyeluruh, memastikan informasi tidak hanya disampaikan kepada penerima manfaat, tetapi juga kepada masyarakat secara umum.

Berdasarkan teori dan hasil wawancara, kejelasan informasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan media yang mudah dipahami oleh masyarakat, seperti poster atau infografis. Koordinasi dapat dioptimalkan melalui platform komunikasi khusus yang melibatkan semua pihak terkait. Responsivitas dapat ditingkatkan dengan menyediakan layanan pengaduan berbasis teknologi yang mudah diakses oleh masyarakat. Inklusivitas dapat diperbaiki dengan melibatkan masyarakat yang belum terdaftar dalam sesi sosialisasi program. Terakhir, ketepatan waktu dalam penyampaian informasi dapat diperkuat dengan membuat kalender kerja terintegrasi yang melibatkan semua pelaksana program. Dengan pendekatan ini,

komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PKH serta memperkuat implementasi program di tingkat lokal.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik mempengaruhi keberhasilan implementasi PKH. Masyarakat di desa, terutama petani dengan ekonomi pas-pasan, terkadang merasa kecemburuan sosial karena tidak semua keluarga mendapatkan bantuan. Ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan program, meskipun pendamping berusaha memberikan edukasi agar yang tidak menerima bantuan dapat lebih memahami kebijakan tersebut. Beberapa informan mengungkapkan bahwa ada ketimpangan dalam distribusi bantuan, dengan faktor sosial atau kedekatan politik yang memengaruhi siapa yang mendapatkan manfaat, menciptakan ketidakjelasan di antara warga yang membutuhkan bantuan namun tidak terdaftar dalam program.

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Pearce dan Robinson (2011), lingkungan eksternal seperti kondisi ekonomi, dinamika sosial, dan stabilitas politik dapat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Kondisi ekonomi yang sulit sering kali menjadi pendorong utama kebutuhan masyarakat terhadap bantuan sosial. Namun, dinamika sosial seperti kecemburuan sosial dan politik lokal juga dapat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap program ini.

Kondisi ekonomi masyarakat di Kampung Sumber Rejeki yang mayoritas bekerja sebagai petani dengan pendapatan pas-pasan memiliki pengaruh langsung terhadap kebutuhan akan PKH. Sesuai dengan teori kebutuhan dasar dari Maslow (1943), masyarakat yang berada pada tingkat ekonomi rendah lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan pendidikan. Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa bantuan PKH sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok dan pendidikan anak. Namun, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang informan, ada penerima potensial yang tidak dapat mengakses bantuan karena tidak memenuhi kriteria tertentu, seperti tidak memiliki anak usia sekolah atau lansia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program ini dirancang untuk membantu masyarakat miskin, keterbatasan kriteria dapat menjadi penghambat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kecemburuan sosial menjadi isu utama dalam pelaksanaan PKH, sebagaimana disampaikan oleh beberapa informan. Kecemburuan ini muncul karena tidak semua warga yang membutuhkan mendapatkan bantuan, sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Coleman (1988) tentang modal sosial, di mana hubungan sosial yang kuat dan kepercayaan antar masyarakat serta kepada pemerintah diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program. Pendamping PKH memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, seperti yang disampaikan oleh beberapa

informan. Edukasi ini bertujuan untuk menjelaskan kriteria penerima manfaat dan mengurangi ketegangan sosial.

Politik lokal juga memengaruhi distribusi PKH, seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan. Mereka merasa distribusi bantuan dipengaruhi oleh kedekatan sosial atau politik dengan aparat desa. Hal ini mendukung pendapat Grindle (2007), yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik sering kali terpengaruh oleh dinamika politik lokal, termasuk hubungan patronase. Ketidakjelasan dalam proses pendaftaran dan distribusi bantuan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program, seperti yang disampaikan oleh beberapa informan. Untuk mengatasi ini, perlu adanya transparansi dalam proses pendaftaran dan distribusi bantuan, serta pengawasan ketat dari pemerintah pusat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup, dan memberikan akses terhadap kebutuhan dasar. Meskipun tujuannya dipahami dengan baik, kendala seperti distribusi bantuan yang belum merata dan komunikasi yang kurang optimal masih ada. Program ini memiliki sumber daya yang memadai, namun anggaran terbatas dan distribusi yang belum merata menjadi tantangan, terutama di daerah terpencil. Beberapa kelompok masyarakat merasa terabaikan karena informasi yang kurang inklusif. Oleh karena itu, peningkatan anggaran, pelatihan pendamping, serta pemanfaatan teknologi sangat diperlukan. Pendamping sosial berperan penting dalam keberlanjutan program, meskipun beberapa masyarakat merasa kurang terlibat dalam sosialisasi. Sikap positif dan profesional dari pelaksana sangat penting untuk keberhasilan program, meskipun komunikasi dan transparansi perlu diperbaiki. Tantangan inklusivitas dan ketepatan waktu informasi juga perlu diatasi, dengan memanfaatkan media dan platform komunikasi yang mudah dipahami. Kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada bantuan sosial menimbulkan kecemburuan sosial dan keterbatasan akses bagi kelompok rentan. Pengawasan dan transparansi dalam distribusi bantuan sangat diperlukan untuk memastikan keadilan dalam PKH.

DAFTAR PUSTAKA

- A.H Maslow. 1943. "A Theory of Human Motivation", Psychological Review, hal. 370; A.H Maslow, Motivation and Personality (New York; Harrper and Row, 1954).
- Coleman, J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital Author. The American Journal of Sociology, 94(Supplement), S95–S120.
- Dunn, William N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah Mada University

- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- RAWLS, J. (1971) *A Theory Of Justice*. London: Cambridge Mass Harvard University Press
- Pearce II, J. A., & Robinson, R. B. (2011). *Strategic Management Formulation, Implementation and Control*, 12th edition. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- Harahap, Rapi 2024. Apa itu bantuan PKH Kementerian Sosial dan Siapa saja yang bisa dapat, (online) (<https://dinsos.asahankab.go.id>)
- Hanin, F 2017. *Implementasi Kebijakan Publik*, (Online) (<https://repositori.uma.ic.id>)
- Herlina, 2019 *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai*, Program Magister Ilmu Administrasi Publik Univesititas Medan Area.
- Isman, Mubdi 2021. *Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)*. Lampung Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021 buku pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan (<https://kemensos.go.id/pedoman-pelaksanaan-program-keluarga-harapan2021->)
- Maizella, Yelfi 2021. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar* . Pekanbaru Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Marwani, Kahfi Septian. 2019 *Pengaruh Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
- Mirsandi, Cut Razi 2019. *Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi diKecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)*. Banda Aceh Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Mulyono. 2009 *Model Proses Implementasi Kebijakan*(Van Meter and Van Horn). Universitas Sebelas Maret
- Sipayung RS 2019. *Pengertian Implementasi Kebijakan*, (Online), E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta (<https://e-journal.uajy.ac.id>)
- Suryabrata, S 2014 *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Sugiyono. 2018 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Bandung: CV Alfabeta.

Yusuf M.Arif 2021. 15 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli, (online), (https://www.gamedia.com/literasi/pengertian_dan_fungsi_lembaga_negara/)

Yashilva, Willy 2024 Tren kemiskinan di Indonesia dalam 5 tahun terakhir (<https://data.goodstats.id/statistic/tren-kemiskinan-di-indonesia-dalam-5-tahun-terakhir->)

Utomo, Dedy 2013 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin. Universitas Brawijaya. Malang.